

Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Batubara JFX
75.000 ton Ludes Diboyong**

**Permendag
No. 44/M-DAG/PER/7/2014
Ciptakan Kepastian Hukum &
Iklim Usaha Kondusif**

**Cermin Industri PBK
Semester I 2014**



DAFTAR ISI

Berita Utama.....	4-7
- Cermin Industri PBK Semester I 2014	
Resi Gudang.....	8-9
- Pokja SRG: Butuh Sinergi Dorong Implementasi SRG	
Pasar Lelang.....	10-11
- Batubara JFX 75.000 ton Ludes Diboyong	
- Pasar Lelang Bawang Harga Rendah Petani Gundah	
Perdagangan.....	12-13
- Kemendag Bentuk TFKN Atasi Anjloknya Harga Karet	
- Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2014 Ciptakan Kepastian Hukum & Iklim Usaha Kondusif	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita.....	16-17
- e-reporting PBK Berjalan Efektif	
- RI Bertekad Jadi Pusat Kopi Dunia	
- Pergub Jateng Tentang SRG, Instrumen Penting Wujudkan Kartu Petani	
- Permendag No. 39/M-DAG/Per/7/2014 Tertib Administrasi Eksportir Batubara	
Analisa.....	18
Breaking News.....	19
Info SRG.....	20-21

Kiprah...26-27

Back to Basic



Forum...22

Pokja SRG Percepat
Implementasi



Kolom...23-25

Menilik Perdagangan Bawang
Merah Brebes



Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



buletin
Bappebti
BUJUKAN HARGA & PERDAGANGAN KOMODITI

Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab
Sutriyono Edi

Pemimpin Redaksi
Sri Nastiti Budianti

Wakil Pemimpin Redaksi
Taufik K.S

Dewan Redaksi
Natalius Nainggolan, Himawan Purwadi,
Widiastuti, Yuli Edi Subagio,
Yovian Andri, Tomi Setiawan,
Annisa F. Wulandari, Poppy Juliyanti.

Sirkulasi
Apriliyanto,
Annisa Fitri Wulandari, Katimin.

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id



Foto : Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti Budianti, bersama sejumlah pejabat Bappebti mengabadikan momen perayaan HUT RI ke 69.

Sebagai dampak dari melambatnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara *emerging economies*, termasuk Indonesia, mulai menunjukkan perlambatan pada tahun 2013. Selain itu kebijakan pengurangan stimulus moneter atau *tapering off* oleh Bank Sentral Amerika Serikat, mengakibatkan gejolak yang amat tajam di sektor keuangan di banyak negara *emerging economies*, termasuk India, Turki, Brazil, Afrika Selatan dan juga Indonesia. Tekanan terhadap perekonomian Indonesia tercermin pada tekanan dalam defisit transaksi berjalan dan gejolak di sektor keuangan. Akibatnya, nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang cukup besar sebagaimana yang kita rasakan dalam beberapa waktu terakhir.

Demikian antara lain kutipan isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan, yang dibacakan di gedung parlemen DPR-RI, 15 Agustus 2014.

Dari kutipan itu, tampak jelas bahwa kondisi perekonomian dunia dan termasuk Indonesia, sedang mengalami perlambatan. Dan dikaitkan dengan kondisi industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia, pidato presiden tersebut seakan membenarkan terjadinya penurunan kinerja investasi perdagangan berjangka komoditi.

Dari data Bappebti, semester pertama (Januari – Juli) 2014, total transaksi perdagangan berjangka komoditi mengalami penurunan sebesar 25,97 % menjadi 3.237.559 lot, dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun 2013 yang mencapai sebesar 4.373.188 lot.

Bahkan kontrak bilateral atau sistem perdagangan alternatif- SPA yang selama ini mendominasi likuiditas perdagangan berjangka juga turun hingga 28,06 % dan transaksi multilateral turun 16,41 %. Sedangkan transaksi kontrak luar negeri (PALN) justru mengalami pertumbuhan yang positif yakni naik hingga 22,6 %.

Meski demikian, presiden tetap optimis dengan perkembangan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Sebelum menutup pidatonya, presiden mengutip perkataan Bung Hatta, dalam pidato pembelaannya di muka hakim di Den Haag, yang mengutip pujangga Belanda Rene De Clercq, dikatakan "Hanya ada satu negeri, yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku."

"Ya, usaha kita bersamalah, yang membuat negeri ini tumbuh, usaha kita bersamalah yang membuat negeri ini berkembang. Usaha bersama itu tentu berangkat dari niat dan kehendak baik kita semua," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Senada dengan itu, Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, pada acara Sinergitas Industri Perdagangan Berjangka Komoditi dan Arah Kebijakan Bappebti, di Jakarta, 14 Agustus 2014, lalu, dikatakan, "kalau kita pemain bola, maka tidak mungkin bisa bermain sendiri. Diperlukan kerjasama yang baik untuk mencapai keberhasilan."

Salam!



Cermin Industri PBK Semester I 2014

Kemenangan dalam permainan sepakbola hanya akan diraih melalui kerjasama tim. Untuk dapat melakukan pola penyerangan yang baik dan dapat menghasilkan gol, maka dibutuhkan adanya koordinasi antar pemain perlini, baik belakang, tengah maupun depan.

Kalimat itu hanyalah sebuah analogi yang menggambarkan pandangan Kepala Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Sutriono Edi, melihat persamaan antara permainan sepak bola dengan industri PBK (perdagangan berjangka komoditi).

"Kalau kita pemain bola, maka tidak mungkin bisa bermain sendiri. Diperlukan kerjasama yang baik untuk mencapai keberhasilan," ujar Sutriono Edi, pada acara Sinergitas Industri Perdagangan Berjangka Komoditi dan Arah Kebijakan Bappebti, di Jakarta, 14 Agustus 2014 lalu.

Dalam arahan Sutriono Edi, yang dihadiri sejumlah direksi perusahaan pialang berjangka, pedagang berjangka, bursa berjangka dan lembaga kliring, Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) dan

perwakilan bank margin, dikatakan, kinerja perusahaan pialang berjangka pada semester pertama 2104 belum memuaskan. "Berdasarkan hasil evaluasi Bappebti, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi perusahaan pialang," katanya.

Diantaranya, masih banyaknya kasus perdagangan bilateral yang memberikan dampak negatif, WPB (Wakil Pialang Berjangka) tidak sepenuhnya melaksanakan fungsinya, masih ada penyalahgunaan tenaga marketing, peran direktur kepatuhan masih belum optimal, masih ada pelanggaran transaksi dan keuangan, masih ada penyalahgunaan dana nasabah, masih ada yang tidak memenuhi persyaratan keuangan, masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan keuangan, masih ada pelanggaran kegiatan operasional,



dan mayoritas transaksi multilateral tidak tercapai.

Sedangkan untuk bursa berjangka, Sutriyono Edi, mengatakan, kinerjanya masih belum memenuhi amanat UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi bursa berjangka yakni JFX (Jakarta Futures Exchange) dan BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia). Diantaranya, kontrak di bursa berjangka tidak seluruhnya diminati pelaku pasar, platform perdagangannya belum *"user friendly"*, kurang optimalnya pengawasan pasar (multilateral), belum optimal untuk memastikan transaksi SPA yang didaftarkan ke bursa, sistem pengawasan yang belum optimal, dan belum optimal mengembangkan pasar fisik komoditi untuk dijadikan referensi harga bagi pelaku di bursa berjangka.

Sementara itu, evaluasi untuk lembaga kliring berjangka, diantaranya, belum optimal melakukan pengawasan atas integritas keuangan, belum optimal untuk memastikan transaksi SPA yang dilaporkan ke lembaga ini, tidak secara aktif turut membantu mengembangkan kontrak yang diminati pasar, dan tidak secara aktif turut membantu mengembangkan pasar fisik komoditi.

Di sisi lain, evaluasi bagi bank penyimpan margin, Bappebti berpandangan, bank margin belum terkoneksi langsung dengan sistem pelaporan rekening terpisah yang ada di Bappebti, dan pembekuan atau pemblokiran rekening terpisah oleh bank penyimpan margin tidak dikoordinasikan dengan Bappebti.

Terkait masalah asosiasi, Sutriyono Edi, menyoroti pembentukan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka (AIPB) yang sudah diamanatkan oleh UU, hingga saat ini belum dapat dibentuk. Karena itu, ditargetkan dalam waktu dekat harus terbentuk. "Dua bulan ke depan (bulan November 2014), ditargetkan AIPB harus sudah terbentuk," tegasnya.

Sedangkan nasib asosiasi yang sudah ada saat ini yakni APBI dan IP2BI, nantinya



akan dilebur menjadi AIPB. "Selama ini asosiasi yang ada belum berperan menjembatani seluruh kepentingan pelaku PBK. Hal itu karena tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam pengembangan PBK," papar Sutriyono.

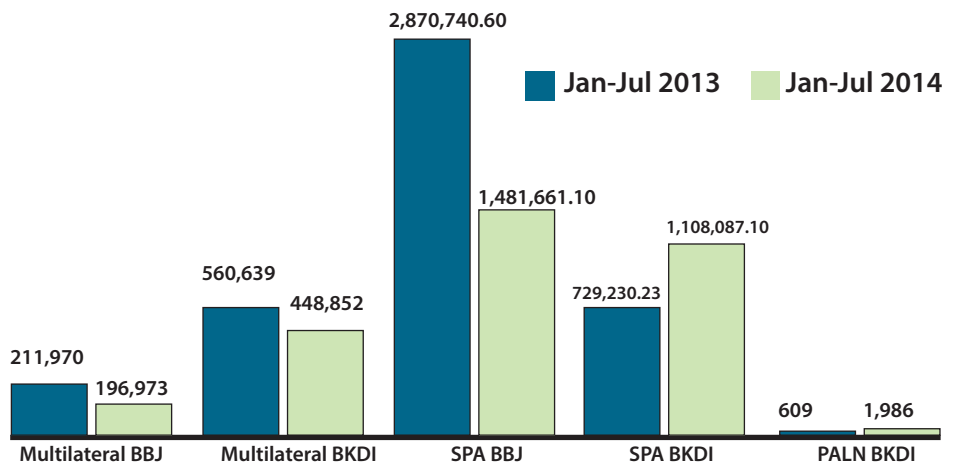
Kinerja

Catatan Bappebti terhadap kinerja industri PBK pada semester pertama (Januari – Juli) 2014, menurut Sutriyono Edi, total transaksi mengalami penurunan sebesar 25,97 %

menjadi 3.237.559 lot, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 yang mencapai sebesar 4.373.188 lot. Kinerja kontrak bilateral atau sistem perdagangan alternatif- SPA yang selama ini mendominasi likuiditas perdagangan berjangka juga turun hingga 28,06 % dan transaksi multilateral turun 16,41 %. Sedangkan transaksi kontrak luar negeri (PALN) justru mengalami pertumbuhan yang positif yakni naik hingga 22,6 %.

"Meski transaksi multilateral turun, tapi pada periode ini, transaksinya telah

Total Transaksi 2013-2014 (Lot)



Sumber : BBJ dan BKDI (Diolah Bappebti, Kementerian Perdagangan)



melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam aturan (5% dari total transaksi) yaitu sebanyak 19, 9% dari total transaksi," kata Sutriyono Edi.

Terkait penurunan kinerja industri PBK tersebut, Dirut PT Jalatama Berjangka, Jacob Ongkowidjojo, kepada **Buletin Bappebti**, mengatakan pandangannya, "sejak awal tahun 2014 memang telah terjadi penurunan kinerja perdagangan berjangka. Hal ini sangat erat hubungannya dengan agenda politik bangsa Indonesia yang menyelenggarakan Pemilu. Sehingga konsentrasi masyarakat khusus kalangan investor mengambil sikap *wait and see*."

"Tetapi penurunan kinerja itu tidak saja terjadi di industri PBK, di pasar

modal pun relatif sama. Hal ini dampak dari perekonomian global yang juga ikut menurun," jelas Jacob Ongkowidjojo.

Senada dengan itu, Dirut PT Kontak Perkasa Berjangka, Parlindungan Simanjutak, mengatakan, selama ini kontrak berjangka berbasis komoditi emas menjadi primadona kalangan investor. "Tetapi karena kinerja kontrak berjangka emas di pasar global juga kurang menarik, yang disebabkan harganya kurang bagus, maka kalangan investor pun banyak menunda transaksinya."

"Ditambah lagi, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang asing relatif stabil. Jadi banyak investor yang mengalihkan capitalnya ke investasi bidang lain. Tetapi kami tetap

optimis kinerja industri ini hingga akhir tahun akan mencapai target, sepanjang iklim politik di dalam negeri kondusif," tutur Parlindungan Simanjutak.

Arah Kebijakan

Bercermin dari kinerja industri PBK pada semester pertama 2014 itu dan untuk mewujudkan PBK yang teratur, wajar, efisien-efektif dan transparan, maka Bappebti menetapkan beberapa sasaran rencana aksi sesuai tupoksinya sebagai otoritas PBK di Indonesia.

Dikatakan Sutriyono Edi, tujuan menetapkan sasaran rencana aksi itu untuk mewujudkan bursa berjangka sebagai sarana *price discovery* dan *hedging effectiveness*. "Di samping itu

Perkembangan Transaksi PBK Tahun 2011-2014 (Lot)

JENIS KONTRAK		2011	2012		2013		JAN-JUL 2013	JAN-JUL 2014	
		Volume	Volume	Presentase Perubahan	Volume	Presentase Perubahan	Volume	Volume	Presentase Perubahan
-	Transaksi Multilateral BBJ	78,505	189,605	141.52	326,885	72.39	211,970	196,973	-7.08
-	Transaksi Multilateral BKDI	872,823	946,731	8.47	934,685	-1.27	560,639	448,852	-19.94
Total Transaksi Multilateral		951,328	1,136,336	19.45	1,261,540	11.02	772,609	645,825	-16.41
-	Transaksi SPA BBJ	7,508,080	6,744,309.00	-10.17	4,195,275.70	-37.80	2,870,740.60	1,481,661.10	-48.39
-	Transaksi SPA BKDI	0	101,408.26	100.00	1,421,307.68	1,301.57	729,230.23	1,108,087.10	51.95
Total Transaksi SPA		7,508,080	6,845,717	-8.82	5,616,583.38	-17.95	3,599,970.83	2,589,748.20	-28.06
-	Transaksi Luar Negeri (PALN) BBJ	539	0	-100.00	0	0.00	0	0	0.00
-	Transaksi Luar Negeri (PALN) BKDI	710	2,286	221.97	1,031	-54.90	609	1,986	226.11
Total Transaksi PALN		1,249	2,286	83.03	1,031	-54.90	609	1,986	226
Total Volume Transaksi BBJ		7,587,124	6,933,914.00	-8.61	4,522,130.70	-34.78	3,082,710.60	1,678,634.10	-45.55
Total Volume Transaksi BKDI		873,533	1,050,425.26	20.25	2,357,023.68	124.39	1,290,478.23	1,558,925.10	20.80
Total Volume Transaksi PBK		8,460,657	7,984,339.26	-5.63	6,879,154.38	-13.84	4,373,188.83	3,237,559.20	-25.97

Sumber : BBJ dan BKDI (Diolah Bappebti, Kementerian Perdagangan)



yang tak kalah penting yaitu melindungi kepentingan semua pihak dan pencapaian fungsi pembinaan, pengawasan serta *law enforcement*," tegas Sutriyono Edi.

Berikut ini adalah sasaran rencana aksi yang telah ditetapkan Bappebti sesuai Tupoksi-nya sebagai otoritas PBK di Indonesia. Pertama, dari sisi pembinaan, Bappebti akan fokus dalam hal membangun perangkat hukum yang selaras, peningkatan integritas, kompetensi dan profesionalisme SDM

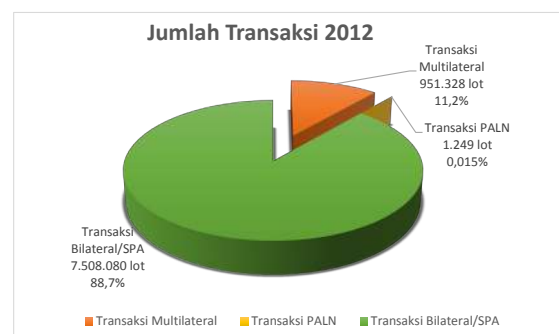
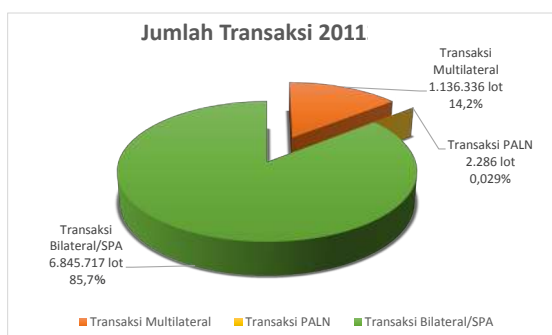
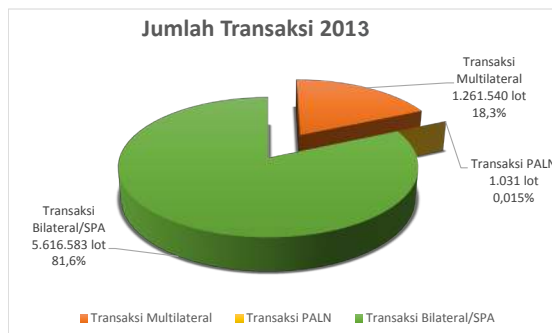
PBK untuk peningkatan daya saing industri PBK, melakukan pembinaan dan kepatuhan dlm industri PBK dengan terlaksananya ketertiban dan etika bisnis yg sehat, meningkatkan kinerja perdagangan kontrak berjangka multilateral yang memiliki prospek di bursa, meningkatkan kualitas kontrak berjangka finansial melalui koordinasi dan aliansi strategis dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, mendukung

pengembangan pasar fisik komoditi serta mendorong peran asosiasi agar dapat membantu pengembangan Industri PBK.

Kedua, dari sisi pengawasan, Bappebti akan fokus dalam perbaikan sistem transaksi dan pelaporan SPA, menggunakan *single platform*, mewajibkan bursa dan kliring membangun sistem pengawasan transaksi multilateral dan SPA yang otomatis, mewajibkan pialang untuk mengkoneksikan sistem pelaporan keuangan dengan Sistem Pelaporan Keuangan Bappebti, serta mengatur kewajiban pelaporan keuangan dan pelaksanaan transaksi Penyelenggara SPA.

Ketiga, dari sisi pengembangan, Bappebti akan *focus* dalam mewajibkan penyempurnaan sistem transaksi multilateral yang *user friendly* dan mampu meminimalisir adanya manipulasi, mewajibkan bursa membina *desk commodity*, dan perusahaan pialang meningkatkan kinerja *desk commodity*, pengembangan sistem yang terkoneksi antara bank penyimpan margin dengan Bappebti, pengembangan aplikasi untuk mengukur *financial literacy* calon nasabah PBK.

Keempat, dari sisi penegakan hukum, Bappebti akan fokus dalam penerapan sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran, serta kewajiban pelaporan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁸





Pokja SRG: Butuh Sinergi Dorong Implementasi SRG

Implementasi SRG diperlukan sinergi antar instansi sehingga terbentuk pola yang memperhatikan kepentingan petani dari pra panen, masa panen dan pasca panen.

Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat, pada periode tahun 2008 hingga Juni 2014, jumlah resi gudang yang diterbitkan sebanyak 1.569 resi dengan total nilai Rp. 323,56 miliar. Atau, total volume komoditas sebanyak 64.889,48 ton terdiri atas 54.805,26 ton gabah; 5.022,47 ton beras; 4.621,36 ton jagung; 20,39 ton kopi; dan 420 ton rumput laut. Sementara nilai total pembiayaan yang telah diberikan sebesar Rp 195,6 miliar dengan jumlah resi gudang yang diagunkan sebanyak 1.303 resi.

Demikian perkembangan sistem resi gudang (SRG) yang dipaparkan Kepala Bagian Pembinaan Pasar Lelang dan SRG, Bappebti, Yuli Edi Subagio, kepada Buletin Bappebti, Agustus lalu. Pemaparannya itu merupakan draf hasil pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) SRG, pada 25 Juni

2014, lalu.

"Secara keseluruhan, pembangunan gudang SRG totalnya mencapai 117 unit yang tersebar di 102 kabupaten dan 10 provinsi," terang Yuli.

Sementara itu, pembiayaan SRG telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, dan Bank Sumatera utara. Keberpihakan kepada petani ini juga dilakukan lembaga keuangan non-bank, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (KUKM).

Sedangkan dari sisi Pengelola Gudang SRG, tambahanya, Bappebti telah memberi izin kepada PT Bhanda Ghara Rekta (Persero); PT Pertani (Persero); PT Sucofindo (Persero); PT Pos Indonesia

(Persero); PT Gunung Lintong; PT Food Station Tjipinang Jaya; Koperasi Selaras, Lombok Timur; Kospermindo, Makassar; Koperasi Niaga Mukti, Cianjur; KSU Annisa, Subang; Koperasi Tuntung Pandang, Batola.

Sinergitas

Untuk mengimplementasikan SRG, kata Yuli Edi Subagio, diperlukan sinergi antar instansi. Sehingga terbentuk pola SRG yang memperhatikan petani dari pra panen, masa panen dan pasca panen. "Seharusnya, SRG ini merupakan program unggulan bersama. Dengan itu, jalan menuju implementasi SRG akan terbuka lebar. Karena itu, implementasi SRG membutuhkan dukungan dari para *stakeholder*. Untuk Pemerintah Pusat, diharapkan dukungan dari beberapa kementerian terkait."

"Sebab itu, dalam implementasi SRG



ini, kami pun sudah memetakan bentuk-bentuk dukungan dari berbagai instansi terkait, sehingga terjalin sinergitas yang berdampak positif bagi perkembangan SRG di masa mendatang,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan Yuli Edi Subagio, bentuk dukungan yang diharapkan dari Kemenko Perkonomian, antara lain, melakukan penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan SRG, pengoordinasian antar sektor pertanian, keuangan, perbankan dan sektor terkait lainnya untuk pengembangan SRG, kerjasama antar Instansi dalam penyiapan SRG dari Pra-Panen hingga Pasca Panen, serta koordinasi pengembangan Informasi Harga Komoditas.

Kementerian Perdagangan: Sinergi kebijakan persyaratan impor terkait dengan persyaratan pembelian komoditi dalam negeri (Dit. Impor); pertukaran data informasi ketersediaan beras/gabah/jagung serta pemanfaatan gudang SRG dan sinergi informasi mengenai sebaran gudang (Dit. Bapokstra dan Dit. Logistik dan Sarana Distribusi); pertukaran informasi terkait waktu dan jumlah impor beras dan jagung (Dit. Impor); pelatihan bagi pengelola gudang untuk dapat melakukan pengujian mutu komoditi (Dit. PPMB); serta mendorong pemanfaatan SRG untuk pembiayaan

dan penyimpanan komoditi Ekspor (Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan).

Kementerian Pertanian: Sinergi Peserta LDPM untuk ikut serta dalam SRG, pemanfaatan gudang lumbung milik Gapoktan untuk menjadi gudang transit atau pengumpulan sebelum dikirim ke gudang SRG, dan pelatihan bagi Tenaga Penyuluh Lapangan untuk ikut mensosialisasikan SRG.


Kementerian Kelautan dan Perikanan: Pemanfaatan gudang-gudang rumput laut yang telah dibangun dalam skema SRG, dan mendorong pelaksanaan SRG untuk komoditi garam. Sedangkan Kementerian Keuangan: Optimalisasi pemanfaatan dan penyaluran Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG).

Adapun Kementerian Koperasi dan UKM: Optimalisasi penyaluran LPDB melalui SRG; dan penguatan dan pemberdayaan koperasi sebagai calon Pengelola Gudang SRG. Dan, Kementerian Dalam Negeri: Mendorong daerah memanfaatkan SRG sebagai salah satu solusi menekan inflasi dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sementara dukungan yang diharapkan dari Pengelola Gudang SRG: Meningkatkan pemanfaatan SRG dan menjadi *standby buyer* untuk komoditi yang disimpan di gudangnya; ikut melakukan sosialisasi pemanfaatan

SRG bagi petani maupun para pelaku usaha; mendorong petani, kelompok tani, maupun para pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG sesuai UU No. 9 Tahun 2006.

Perbankan: Meningkatkan komitmen dan kesiapan perbankan dalam memberikan pembiayaan melalui skema SRG, baik untuk petani/kelompok tani/gapoktan maupun pedagang, pabrikan dan eksportir; melakukan sosialisasi SRG bersama dengan Bappebti; serta mempermudah dan menurunkan biaya-biaya terkait pembiayaan menggunakan Resi Gudang sesuai UU No. 9 Tahun 2006 tentang SRG.

BUMN: Optimalisasi PKBL yang dimiliki dalam mendorong pelaksanaan SRG; menjadi *standby buyers* untuk komoditi SRG; pengembangan IS-WARE yang mengarah pada sistem informasi yang handal dan memiliki daya tarik masuknya *stakeholders* dalam SRG (PT KBI); dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional diharapkan BUMN yang bergerak di pangan dapat melakukan pengelolaan pangan menggunakan SRG; berperan aktif sebagai Pengelola Gudang SRG; serta melakukan sosialisasi SRG bersama dengan Bappebti dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait. 



Kepala Bagian Pembinaan Pasar Lelang dan SRG, Bappebti, Yuli Edi Subagio

Pembangunan Gudang SRG

A. Tahun 2009	:	41	unit
B. Tahun 2010	:	11	unit
C. Tahun 2011	:	14	unit
D. Tahun 2012	:	14	unit
E. Tahun 2013	:	14	unit
F. Tahun 2014 (proses)	:	23	unit

Total Gudang	:	117	unit
Total Kabupaten	:	102	kabupaten
Total Propinsi	:	25	propinsi



Batubara JFX

75.000 ton Ludes Diboyong

Perdagangan online batubara JFX membantu pengaturan tata niaga dan mendapatkan harga terbaik.

Lelang perdana komoditi batubara produksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk., melalui pasar fisik online Jakarta Futures Exchange- JFX, pada Kamis 21 Agustus 2014, diikuti sebanyak 21 trader internasional. Lelang yang dibuka selama tiga jam itu, mencatatkan transaksi sebanyak 75.000 ton batubara produksi PTBA. Sementara itu, penawar harga terbaik dimenangkan oleh *buyer* yang berasal dari Singapura.

Menurut Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, komoditi batubara yang terjual sebanyak 75.000 ton tersebut terdiri dari dua jenis. Masing-masing batubara kualitas BA-70 HS sebanyak 60.000 ton dengan harga US\$ 62,5 per ton, dengan pengapalan bulan September 2014 dari Pelabuhan Taruhan, Bandar Lampung. Sedangkan sisanya sebanyak 15.000 ton dengan kualitas BA-63, dengan harga US\$ 74 per ton yang akan dikapalkan melalui Dermaga Kertapati, Palembang.

"Sejatinya, perdagangan fisik komoditi batubara di JFX sudah diselenggarakan secara online pada 1 Juli 2014, lalu. Namun, hari ini (Kamis, 21/08) PTBA baru membuka penawarannya ke publik. Hal itu dimaksudkan agar semakin banyak calon pembeli yang menawarkan harga terbaik," jelas Bihar.

Menyusul kesuksesan lelang online perdana batubara tersebut, PTBA dalam waktu dekat segera melakukan *create auction* penawaran batubara berikutnya. Di sisi lain, PTBA juga meningkatkan kapasitas produksi dan angkutan pasokan batubara.

Dirut PTBA, Milawarma, menjelaskan, meski harga batubara akhir-akhir ini mengalami tren penurunan, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi pasar fisik



batubara di JFX. Sebab target transaksi setahun ke depan tetap sesuai dengan rencana semula.

"Justru dengan adanya sistem perdagangan lelang batubara secara online di JFX akan membawa manfaat bagi industri pertambangan batubara di tanah air. Karena perdagangan online itu akan membantu pengaturan tata niaga batubara menjadi lebih baik lagi," kata Milawarma.


Lebih jauh dikatakan Milawarma, sekarang ini margin keuntungan batubara di Indonesia berkisar 5 %. Tetapi itu lebih baik dari pada harga tinggi tetapi volume produksi batubara kita rendah.

Menurut Milawarma, PTBA secara bertahap akan meningkatkan volume produk untuk diperdagangkan di JFX. Dan untuk tahun ini, hampir 20 juta ton dari total produksi PTBA sudah hampir *full committed*. "Tetapi mulai tahun 2015, kapasitas angkutan kereta api PTBA akan meningkat menjadi 22,7 juta ton per tahun."

"Kita harapkan peningkatan kapasitas angkutan kereta api itu akan meningkatkan transaksi batubara PTBA melalui pasar fisik JFX," jelas Milawarma.

Di sisi lain dikatakan Bihar, melalui perdagangan fisik online batubara di JFX,

para pelaku pasar batubara akan lebih mudah melakukan transaksi, karena dapat diakses dari dalam dan luar negeri. Di samping itu, perdagangan ini memberikan keleluasaan kepada produsen batubara untuk mengatur waktu penyerahan penjualan, mulai dari penyerahan penjualan saat ini sampai penyerahan penjualan beberapa bulan kemudian, bahkan beberapa tahun kemudian, jika diinginkan oleh para pelaku. "Pada prinsipnya perdagangan ini merupakan perdagangan spot dan forward batubara online. Selain keleluasaan memilih waktu penjualan, produsen batubara juga bebas menentukan pelabuhan penyerahan serta kualitas batubara yang akan dijual," ujar Bihar.

"Di samping itu, transaksi melalui pasar fisik online JFX diharapkan tidak saja mendapatkan harga terbaik, melainkan juga agar perdagangan batubara menjadi lebih *fair*, transparan dan wajar sehingga membawa dampak bagi perkembangan tata niaga industri batubara nasional dan perekonomian nasional pada umumnya," pungkas Bihar Sakti Wibowo. 

Pasar Lelang Bawang Harga Rendah Petani Gundah

*Harapan petani bawang Kab. Brebes peroleh harga tinggi,
tidak disambut penawaran pembeli*



Komoditi bawang merah hasil produksi petani kabupaten Brebes yang dipasarkan melalui pasar lelang oleh Disperindag, Jateng, Selasa, 26 Agustus 2014, di Pasar Klampok, Brebes, Jateng, kurang diminati pembeli. Tidak adanya penawaran dari kelompok pembeli yang disebabkan harga bawang yang ditawarkan petani terlalu tinggi.

Dari pantauan **Buletin Bappebti** di *backoffice* penyelenggara lelang, tercatat harga tertinggi bawang merah jenis askip dibandrol petani sebesar Rp 18.000 per kg, sedangkan harga terendah sebesar Rp 12.000 per kg.

Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Juwari, dikesempatan pasar lelang itu mengatakan, "untuk saat ini hasil panen bawang merah hanya bisa dijual dengan harga Rp 6.000 per kg."

"Jadi kalau petani mau untung, setidaknya menjual bawang di atas ongkos produksi berkisar Rp 12.000 per kg. Kalau kondisi bawang merahnya super bisa saja sekitar Rp 16.000 per kg," kata Juwari.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Brebes, Zaenudin AK, mengatakan, saat ini harga

bawang memang sedang turun. Selain karena panen raya, kondisi transportasi juga mempengaruhi turunnya harga bawang. Di samping itu, pasca lebaran kondisi lalu lintas di Brebes atau Pantura mengalami ketersendatan akibat amblesnya Jembatan Comal di Pemalang, sehingga arus dialihkan.

"Akibatnya stok bawang dipasaran saat ini melimpah, sedangkan transportasi tidak lancar. Karena itu, kami akan mengupayakan agar harga bisa naik, salah satunya melalui digelarnya pasar lelang bawang merah ini," jelas Zaenudin.

Penyelenggaraan pasar lelang bawang merah di Pasar Klampok, Brebes, itu dihadiri sejumlah pedagang dari sekitar Jateng, Jakarta, Jambi dan Baritokuala. Salah satu peserta lelang yang berasal dari pedagang bawang Jambi, Gusman, mengatakan, harga bawang yang ditawarkan di pasar lelang masih terlalu tinggi.

"Kami ketahui hari ini akan diselenggarakan pasar lelang bawang di Brebes, karena itu kami dengan sengaja datang dari Jambi. Tetapi ternyata harga harapan yang ditawarkan petani masih terlalu tinggi," jelas Gusman.

Sebelum hadir di pasar lelang ini, tambah Gusman, harga pasaran bawang merah di Pasar Angsaduo, yang sudah saya pantau berkisar Rp 9.000 per kg. Sedangkan di sini harga bawang merah tidak ada di bawah harga Rp 10.000 per kg.

Sementara itu, menurut Ketua Koperasi Petani Bawang Merah Indonesia (Kobmindu), Suhemi, mengatakan, tidak adanya transaksi bawang merah di pasar lelang disebabkan peserta dihari para petani. "Para petani membuat harga harapan yang terlalu tinggi, sedangkan pembeli yang berasal dari berbagai daerah mengharapkan harga terendah karena pembeli masih menanggung biaya transport."

"Kondisi ini memang kelihatan tidak wajar karena harga bawang yang terlalu tinggi. Pada hal di luar pasar lelang harga bawang berkisar Rp 8.000 per kg," terang Suhemi.

Hal yang senada juga dikatakan Ketua Kelompok Tani Sumber Pangan Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba, M. Subhan, "hasil panen bawang merah asal Brebes saat ini kalah bersaing dengan bawang asal Probolinggo dan Nganjuk. Kondisi ini akan semakin memperpuruk kondisi petani yang juga tengah dihadapkan pada menurunnya harga jual di pasaran."

"Apabila keterpurukan ini dibiarkan tanpa ada kebijakan dari pemerintah, nasib petani bawang merah Brebes akan semakin terpuruk. Apa lagi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sudah tidak lama lagi, nasib petani bawang merah Brebes akan semakin terpuruk. Karena bawang impor akan bebas masuk ke wilayah Indonesia," jelas M. Subhan.



Kemendag Bentuk TFKN Atasi Anjloknya Harga Karet

Selain membentuk TFKN, Kemendag juga lakukan kerjasama internasional dengan merangkul emerging rubber producing countries di tingkat ASEAN seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja melalui rencana pembentukan ASEAN Rubber Committee sebagai salah satu perwujudan nyata dari ASEAN Economic Community.

Acara Sambung Rasa Perkaretan Nasional yang digelar di Hotel Intercontinental Bali, pada 22 Agustus 2014, lalu, digunakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Partogi Pangaribuan, mengungkapkan rencana pembentukan Task Force Karet Nasional (TFKN). Dikatakan, pembentukan TFKN merupakan hasil kesepakatan Bali guna mengatasi anjloknya harga karet dunia danantisipasi perdagangan bebas regional dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA 2015.

"TFKN ini merupakan sinergi bersama antar kementerian dan pelaku usaha perkaretan. Dan anggota tim berasal dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, sektor perbankan, serta pelaku usaha perkaretan nasional, baik sektor hulu maupun hilir," ujar Partogi.

Lebih jauh dikatakan Partogi, untuk menstabilkan harga karet dunia, Kemendag terus melakukan diplomasi dalam organisasi-organisasi karet internasional seperti International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan International Rubber Consortium (IRCo). "Kita juga intens mengadakan pembicaraan dengan negara-negara produsen utama karet dunia seperti Thailand dan Malaysia."

"Kami menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen utama karet dunia untuk menjaga keseimbangan supply and demand karet alam dunia, serta menstabilkan harga karet internasional pada tingkat yang remuneratif bagi petani," ujar Partogi.



Diharapkan ke depannya, tambah Partogi, kerjasama internasional tersebut dapat dikembangkan dengan merangkul *emerging rubber producing countries* di tingkat ASEAN seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja melalui rencana pembentukan ASEAN Rubber Committee sebagai salah satu perwujudan nyata dari ASEAN Economic Community.

Andalan Indonesia

Ketua Umum GAPKINDO, Daud Husni Bastari, yang juga turut hadir di acara tersebut mengatakan, tantangan terbesar seiring harga karet menurun hingga di kisaran US\$ 1,66 per kilogram. "Selain itu, permintaan dunia pada pasokan karet alam yang berkelanjutan perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan pelaku usaha nasional," tegasnya.

Perkebunan karet alam ini menyerap lebih dari 2 juta petani kecil yang sangat berperan penting bagi perekonomian masyarakat banyak. "Demi mereka kita harus perjuangkan bersama-sama," kata

Daud Husni Bastari.

Data Kementerian Perdagangan 2013 menunjukkan, sektor karet alam menyumbang 4,61 % dari total ekspor nonmigas Indonesia yang mencapai US\$ 149,92 miliar. Produksi karet alam Indonesia mencapai 3,2 juta ton, dan sekitar 16 % atau sekitar 0,5 juta ton dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan sisanya 2,7 juta ton atau sekitar 84 % diekspor ke berbagai negara tujuan. Volume ekspor karet 2013 mencapai nilai US\$ 6,91 miliar, dibandingkan tahun 2012 angka tersebut menunjukkan peningkatan volume ekspor sebesar 260 ribu ton (10,7%) dari sebelumnya 2,44 juta ton.

Sementara itu, negara tujuan utama ekspor karet pada 2013 adalah Amerika Serikat dengan volume mencapai 609,8 ribu ton (22,6 %), diikuti Tiongkok dan Jepang yang masing-masing sebesar 511,7 ribu ton (18,9 %) dan 425,9 ribu ton (15,8 %).



Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2014 Ciptakan Kepastian Hukum & Iklim Usaha Kondusif

Sebagai negara produsen dan eksportir timah terbesar di dunia, pemerintah berkewajiban melindungi industri timah di dalam negeri dan keberlanjutan tambang timah di masa mendatang.



Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Kebijakan ini merevisi peraturan sebelumnya, yaitu Permendag No. 78/M-DAG/PER/12/2012 dan Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Ketentuan terbaru ini berlaku efektif per 1 November 2014, mendatang.

"Permendag ini direvisi untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, mendukung kelancaran ekspor timah, memenuhi kebutuhan bahan baku timah untuk industri dalam negeri, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta pengawasan ekspor timah," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Partogi Pangaribuan.

Partogi mengatakan, dalam kebijakan itu, timah yang diatur dikelompokkan menjadi empat. Yaitu pertama, timah murni batangan, timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9 %, timah jenis ini merupakan hasil pengolahan dan pemurnian bijih timah


oleh smelter. Kedua, timah murni bukan batangan, yaitu timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,93 % dalam bentuk selain batangan atau dalam bentuk lainnya berbahan baku timah murni batangan. Tiga, timah solder, yaitu timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7 %, dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang digunakan untuk menyolder dan mengelas. Keempat, timah paduan bukan solder, yaitu timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96 % dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang tidak digunakan untuk menyolder dan mengelas.

Bursa Timah

Permendag itu juga menentukan spesifikasi teknis timah yang akan di ekspor seperti kandungan Stannum (Sn) dan unsur lainnya, bentuk dan ukuran timah murni batangan dan timah solder, dan mencantumkan label dan kemasan.

"Timah Murni Batangan sebelum diekspor wajib diperdagangkan melalui

Bursa Timah," kata dia.

Harga timah yang terjadi pada saat timah ditransaksikan di Bursa Timah, tambahannya, digunakan sebagai dasar penghitungan besaran royalti. "Timah dapat diekspor jika telah membayar royalti bagi timah murni batangan, dan membayar royalti atas bahan baku timah yang digunakan bagi timah murni bukan batangan, timah solder dan timah paduan bukan solder." Dia melanjutkan, perusahaan timah yang hendak ekspor wajib memperoleh pengakuan Eksportir Terdaftar Timah (ET-Timah) yang terdiri atas eksportir terdaftar timah murni batangan yang selanjutnya disebut ET-Timah Murni Batangan. Selain itu, Eksportir Terdaftar Timah Industri yang selanjutnya disebut ET-Timah Industri adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Murni Bukan Batangan, Timah Solder, dan atau Timah Paduan Bukan Solder. "Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Industri, harus mendapatkan rekomendasi Dirjen Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian untuk perusahaan pemilik IUI yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, atau gubernur untuk perusahaan pemilik IUI yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Juga, mendapat pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan, atau ET-Timah Industri berlaku selama tiga tahun," katanya. Selain itu, timah yang akan diekspor wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang dan dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. 



Agenda Foto



Ujian Peningkatan Kompetensi Wakil Pialang Berjangka



Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, memberikan pengarahan sekaligus membuka Ujian Peningkatan Kompetensi Wakil Pialang Berjangka yang dilaksanakan di Surabaya, 28 Agustus 2014 lalu.

Dalam pengarahannya Kepala Bappebti menyampaikan, Wakil Pialang Berjangka merupakan suatu profesi yang harus dilaksanakan secara profesional dan membutuhkan keahlian khusus dan kompetensi serta handal di bidangnya. Ujian kompetensi dilakukan kepada para Wakil Pialang Berjangka yang telah memiliki Tanda Lulus Ujian Profesi selama 3 (tiga) tahun atau lebih sejak tanda lulus ujian profesi tersebut diterbitkan.

Ujian Kompetensi Wakil Pialang Berjangka diikuti oleh 117 Wakil Pialang Berjangka yang berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Medan. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Dialog Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilaksanakan di Surabaya TV dan Sindo Trijaya Radio.

Bappebti dan SRO Bahas Upaya Pengembangan PBK

Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu didampingi Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Hariyati memimpin rapat tindak lanjut pertemuan Focus Group Discussion Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di kantor Bappebti, Rabu, 20 Agustus 2014.

Rapat yang dihadiri oleh *self-regulatory organization* (SRO) PBK, yaitu Direksi PT Jakarta Futures Exchange, PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, PT. Kliring Berjangka Indonesia dan PT. Identrust Security International ini membahas mengenai peningkatan transaksi multilateral dan langkah-langkah pengembangan PBK.





Focus Group Discussion PBK Bersama Wamendag



Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi didampingi Kepala Bappebti, Sutriono Edi memberikan pengarahan kepada para Pejabat dan Pegawai Bappebti dalam acara Focus Group Discussion Strategi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi ke depan, di Kantor BAPPEBTI, Jakarta, Senin (18/8).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappebti memberikan presentasi mengenai strategi pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi ke depan.

Dalam arahnya Wamendag menyampaikan bahwa Bappebti perlu mengevaluasi strategi pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi kedepan.

Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK



Bappebti menyelenggarakan kegiatan pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mengenai transaksi kontrak Berjangka Komoditi (Multilateral) di Hotel Prama Grand Preanger, Bandung, 21-22 Agustus 2014. Pada acara tersebut Kepala Bappebti, Bapak Sutriono Edi, memberikan pengarahan kepada para peserta Pelatihan Teknis.

Acara Pelatihan dibuka oleh Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Bapak Pantas Lumban Batu, dan dihadiri oleh Pejabat dan Staf Bappebti, Tim PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Tim PT. Jakarta Futures Exchange, Direktur PT. Kliring Berjangka Indonesia beserta tim, Direktur PT. Identrust Security International, dan Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Indonesia.

Acara ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis para pelaku usaha tentang transaksi kontrak berjangka komoditi (multilateral), sehingga dapat mendukung peningkatan transaksi multilateral yang ada di Bursa Berjangka. Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK tersebut terdiri dari para pegawai Pialang Berjangka yang ditempatkan pada Divisi Commodity yang berada di wilayah Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

e-reporting PBK Berjalan Efektif

Kewajiban perusahaan pialang berjangka menyampaikan laporan keuangan harian secara elektronik atau e-reporting, secara umum telah berjalan baik. Kewajiban itu telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 106/Bappebti/KP/X/2013, tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan bagi Pialang Berjangka.

Kebijakan e-reporting pialang berjangka itu hingga saat ini sudah berjalan selama satu bulan lebih, yang efektif berlaku per 2 Juli 2014. "Kita amati hampir semua perusahaan pialang sudah menyampaikan laporan posisi keuangan harian secara elektronik ke Bappebti. Sehingga Bappebti saat ini dapat mengetahui posisi keuangan dari masing-masing perusahaan pialang untuk dapat melakukan perdagangan berjangka," jelas Kepala Biro Perniagaan, Bappebti, Pantas Lumban Batu, beberapa waktu lalu.

Pantas bilang, pihaknya sangat



mengapresiasi atas hal itu. Karena, latar belakang kebijakan itu dikeluarkan untuk meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka di tanah air. Meski demikian, kata dia, masih ada sebanyak empat perusahaan pialang berjangka sepanjang bulan Juli 2014 yang tidak tertib menyampaikan e-reporting

harian kepada Bappebti.

"Bappebti sudah menyampaikan surat teguran kepada perusahaan pialang bersangkutan. Tetapi sekarang mereka sudah rutin menyampaikan laporan harian. Saya pikir itu hal yang wajar saja, karena ini kebijakan baru sehingga perlu adaptasi," ujar Pantas.

RI Bertekad Jadi Pusat Kopi Dunia



Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat kopi dunia. Selain jenis Robusta dan Arabica yang sudah dikenal dunia, Indonesia berpeluang menjadi rujukan baru kopi dunia melalui ikon Kopi Luwak dan Kopi Tubruk.

Tekad besar ini akan diwujudkan dalam Festival Kopi Indonesia (Indonesian Coffee Festival/ICF) ke-3 di Prama Sanur Beach, Bali, pada 17-19 Oktober 2014 mendatang. "Para konsumen dan pelaku industri perkopian internasional bakal diajak berpetualang menikmati sajian kopi Indonesia dan menjajaki kerja sama bisnisnya," jelas Wakil Menteri Perdagangan RI, Bayu Krisnamurthi, dalam *pers launching* ICF di Jakarta, baru-baru ini.

Bayu berharap, pemain kopi dunia akan menjadikan acara tahunan ICF ini sebagai agenda penting penyelenggaraan festival kopi internasional. "ICF ini perlu dicatat sebagai ajang internasional perkopian Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan bersungguh-sungguh ingin mewujudkan tekad besar Indonesia sebagai pusat kopi dunia di acara ini," tegasnya.

ICF 2014 ditargetkan mampu menggaet 100 pembeli utama perkopian internasional antara lain dari Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, Spanyol, Kanada, Belgia, Inggris, Belanda. Jumlah peserta pameran juga bertambah dari tahun sebelumnya, yakni lebih dari 50 eksibitor baik dari dalam dan luar negeri, serta 7.500 pengunjung domestik dan mancanegara.

Pergub Jateng Tentang SRG, Instrumen Penting Wujudkan Kartu Petani

Dalam percepatan pelaksanaan sistem resi gudang (SRG) di wilayah Jawa Tengah, pada 12 Februari 2014, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2014, tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Jawa Tengah.


Menyusul terbitnya Pergub itu, Ganjar Pranowo juga menerbitkan Keputusan Gubernur No. 510/30 Tahun 2014, tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Jawa Tengah, pada 10 Juni 2014. Tim yang dimaksud dalam percepatan SRG itu, beranggotakan seluruh bupati yang di daerahnya terdapat gudang SRG, dan dibantu kalangan akademisi, perbankan serta lembaga uji mutu.

Menurut Kabag Bina Usaha, Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag, Jateng, Citroso, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini, mengatakan, keluarnya Pergub Jateng itu untuk merealisasikan program Kartu Petani seperti yang dijanjikan di saat kampanye pencalonan Gubernur Jateng tahun 2013 lalu. "Pasca terbitnya Pergub itu, saat ini masih dilakukan pembahasan untuk menerbitkan Kartu Petani dan anggaran yang diperlukan dalam percepatan SRG itu. Diperkirakan program itu akan efektif berjalan pada tahun 2015 mendatang," terang Citroso.

Terbitnya Pergub Jateng tentang SRG itu, lanjut Citroso merupakan terobosan pemerintah daerah Jateng. Sebab,



Gubernur Jateng sangat menyadari bahwa SRG akan efektif berjalan, jika seluruh Pemda serius mengaplikasikannya.

Karena itu, tambahnya, tim yang dibentuk seperti tertuang pada SK Gubernur dalam percepatan SRG di Jateng, beranggotakan seluruh bupati yang di daerahnya terdapat gudang SRG, dan dibantu kalangan akademisi, perbankan serta lembaga uji mutu. "Setelah kami telisik, tampaknya inilah Pergub SRG yang pertama terbit di tanah air," imbuh Citroso. 

Permendag No. 39/M-DAG/Per/7/2014 Tertib Administrasi Eksportir Batubara

Bagian peting dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/Per/7/2014, tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, antara lain tertib administrasi para eksportir dan pemerintah memiliki data akurat terhadap produksi Batubara di dalam negeri dan volume ekspor. Untuk itu, pihak surveyor harus bekerja serius dan transparan.

Sebab jika pihak surveyor 'bermain mata' dengan pelaku batubara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap untuk melakukan audit. Demikian antara lain dikatakan Staf Ahli, Kemendag, Junaedi, di sela-sela sosialisasi Permendag No. 39 Tahun 2014, di Jakarta, di awal Agustus 2014 lalu.


"Pada dasarnya keluarnya Permendag No. 39 itu hanya untuk memberi pengakuan terhadap eksportir, asal-usul Batubara dan volume produksi dan ekspor," katanya.

Ditambahkan Junaedi, selama ini data tentang volume produksi dan ekspor Batubara masih simpang siur. Sebab itu, surveyor yang nantinya mendapat izin dari Kementerian Perdagangan harus memberi data akurat. "Kalau pihak surveyor bermain-main dengan data batubara, maka mereka akan berhadapan dengan KPK."

"Dengan data yang disampaikan pihak surveyor, barulah eksportir terdaftar bisa melakukan ekspor. Itu disertai keterangan bahwa eksportir tersebut sudah

membayar royalti kepada pemerintah," jelas Junaedi.

Lebih jauh dijelaskan, sejauh ini sudah ada sebanyak sepuluh perusahaan yang mendaftar sebagai surveyor Batubara. "Tetapi yang baru memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan yakni PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ada lagi pihak surveyor yang memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan," kata Junaedi.

Merujuk Permendag No. 39/M-DAG/Per/7/2014, tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, berlakunya kebijakan tersebut yakni per 1 September 2014. 




DMSI: Harga CPO Masih Akan Anjlok

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) memprediksi kemerosotan harga CPO yang terjadi selama semester I 2014, masih akan berlanjut. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun, meyakini, paling tidak harga CPO baru akan terkerek pada akhir tahun.

Di sisi lain, dia memprediksi produksi CPO Indonesia sepanjang tahun ini sebanyak 29,5 juta ton. Kemudian stok akan mencapai 2,3-2,5 juta ton. Sedangkan ekspor tak akan setinggi tahun lalu yakni hanya 19 juta ton.

"Kalau pada tahun lalu produksi kita 27,7 juta ton, dan yang diekspor 21,3 juta ton, stok sisa 2,1 juta ton. Pada tahun ini, produksi melimpah tapi kinerja ekspor terutama ke India merosot, sehingga harga ikut menurun. Pada September 2014 belum akan naik (harga CPO), paling baru November atau Desember 2014," ujar Derom, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Derom, mengatakan, harga terendah CPO bukan tak mungkin akan menyentuh US\$ 730-750 per ton sebelum akhir tahun ini. Pada kuartal I 2014 permintaan anjlok dari 58 % menjadi 478.000 ton dari 1,13 juta ton pada kuartal I 2013. Total ekspor minyak sawit ke India melorot 39 % pada periode yang sama, menjadi 1,06 juta ton atau US\$ 863 juta dari 1,73 ton atau US\$ 1,27 miliar pada kuartal I 2013.

Selama ini India menjadi tujuan ekspor utama CPO dan produk turunannya asal Indonesia. Kendati demikian, pada kuartal I 2014, DMSI mencatat permintaan dari India lesu. Selain itu, ekspor minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) ke India juga menurun dari 68.169 ton pada kuartal I/2013 menjadi hanya 22.000 ton pada kuartal I/2014. "Penurunan ekspor ke India berpengaruh sangat signifikan. Mereka juga bahkan mengurangi impor asal Malaysia. Sebelumnya mereka mengimpor 85 % minyak sawit, dan 15 % minyak kedelai dan bunga matahari. Saat ini impor minyak sawit hanya 65-70 %," jelas Derom. 


BI: Kurs Rupiah Sepanjang 2015 di Kisaran Rp 11.800-Rp12.000

Bank Indonesia menyatakan asumsi nilai tukar rupiah BI sepanjang 2015 yang berada di kisaran Rp 11.800-Rp12.000 sudah memperhitungkan kenaikan suku bunga The Fed AS pada tahun depan. "Rupiah yang kami perhitungkan Rp 11.800-Rp12.000 tersebut sudah memperhitungkan dinamik global maupun domestik," kata Gubernur BI Agus Martowardojo, beberapa waktu lalu.

Agus menuturkan, bank sentral AS yang semula diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada semester kedua 2015 mendatang, memiliki kemungkinan dimajukan menjadi lebih cepat jika ekonomi AS terus membaik. "The Fed menaikkan suku bunga bisa pada semester satu atau semester dua 2015. Namun melihat perkembangan terakhir, bisa-bisa dilakukan pada semester satu," ujar Agus.

Namun, lanjut Agus, Indonesia juga harus memiliki fundamental ekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan dari eksternal tersebut, jika tidak maka dapat berdampak terhadap nilai tukar rupiah. "Kita harus mempersiapkan diri dengan baik karena 2015 sudah semakin dekat," kata Agus.

Pemerintah sendiri dalam RAPBN 2015 mengasumsikan nilai tukar rupiah sepanjang 2015 di level Rp 11.900, berada di level moderat dari kisaran asumsi BI. Asumsi nilai tukar RAPBN 2015 itu sendiri lebih tinggi dibandingkan asumsi nilai tukar pada APBN sepanjang 2014 sebesar Rp 11.600.

Rupiah sendiri mengalami tekanan depresiasi dengan volatilitas yang terjaga. Pada triwulan II 2014, rupiah secara point-to-point melemah 4,18 % (qtoq) ke level Rp 11.855 per dolar, sedangkan secara rata-rata rupiah masih mencatat penguatan sebesar 1,76 % ke level Rp 11.629 per dolar. 


Produksi Turun, Harga Kopi Diprediksi Melonjak

Komoditas kopi berjangka diperkirakan mulai memasuki masa penguatan harga, di tengah kekhawatiran permintaan global akan melonjak melampaui jumlah produksi. Wakil Presiden Senior INTL FCStone, Hernando de la Roche, mengatakan, banyak pedagang kopi yang mengkhawatirkan pasokan menyusut karena ancaman

kekeringan yang mengancam tanaman akan layu.

"Kekhawatiran yang terbesar adalah perkiraan untuk panen tahun depan yang kemungkinan akan terganggu dan pengetatan persediaan akan lebih ketat nantinya," ujarnya, beberapa waktu lalu. Sepanjang tahun ini, harga kopi telah melonjak sebesar 80 %. Beberapa

pengecer kopi termasuk Kraft Foods Groups Inc. menaikkan biaya untuk pengemasan produk kopinya.

Sedangkan petani Brazil terpaksa memanen biji kopi yang rusak akibat cuaca kering pada kuartal I/2014. Dan, beberapa analis memprediksi para petani sudah mengantisipasi kemungkinan panen yang buruk pada kuartal II dan III. 




Sinergy of JFX and TAIFEX, the two different character of exchange

Jakarta Futures Exchange (JFX) and Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) on 25th of August 2014 have signed Memorandum of Understanding on product, business & market initiative and technology development and also on Indonesian and Taiwan derivative market's common interest.

On that opportunity, JFX offered commodity futures contract of gold, olein, cocoa, and coffee to TAIFEX member. On the other side, TAIFEX offered derivative and stock commodity.

"We believe that each market has an unique characteristic and more or less each exchange were facing same problem. This opens opportunity for JFX and TAIFEX to collaborate between two exchanges. This collaboration will become new start for JFX on searching for new partner in global exchange level," JFX director, Sherman Rana Krishna explained on his speech.


The same speech came from TAIFEX president, Peter Chium, saying that in regards to face the challenge from global market changes, the collaboration between two exchanges are very important.

"TAIFEX and JFX collaboration will use each exchanges' uniqueness and this collaboration will facilitate the border traffice arrangement that will give advantage to both exchanges in giving better service to their member. In the history of past 17 years, TAIFEX has launched some successfull products for years and we would like to share this experience with JFX," Peter Chiu added. 

Coftra blocked 18 illegal brokers

Coftra has launched list of 18 illegal brokers that have operated in Indonesia. Statement that has been collected Head for Bureau of Law of Coftra, Sri Hariyati on 12th of August said that since the beginning of 2014 Coftra has monitored movement from 18 illegal brokers that offered investment product either through website or directly to the people.

"Therefore we ask people to be careful and be cautious for investment offers from any party who does not have legal license from authorized institution or government," Sri Hariyati said. The precise way from people to be aware of any illegal broker is by giving attention on the license and also the institution who published the license, she added. "As there are parties who informed that they do have legal license but it does not came from legible institution and not published by authorized institution."

"In regards to this, we have coordinated with Informatics and Communication Ministry to block websites of illegal brokers. Letter of intention for this has been sent on 7th of August. We hope with this letter our Minister will arrange blocking to avoid people from any lost risk," Sri Hariyati added. 

Ministry of Trade controlled coal trading


Ministry of Trade issued Ministry of Trade Regulation No. 39/M-DAG/PER/7/2014 on coal export and production regulation. This regulation has been set on 15th of July 2014 and it was effectively on board on 1st of September 2014.

"The background of Ministry of Trade Regulation No.39 year 2014 is on the fact that coal is unrenewable mining product. We need to optimize coal usage for people prosperity and welfare and also need to be effectively and efficiently on maintaining it continually," Foreign trading general director, Partogi Pangaribuan explained in Jakarta on last July 2014.

The aim and objective of this regulation as Partogi added is to prevent over exploitation, enssure coal product demand fulfillment in the country, support the systematic business and

the traceability coal mining product, arrange the product / royalty contribution payment responsibility, and also create business and law certainty for mining businesses.

Moreover Partogi emphasized that the regulation on coal and coal product export is in line with UU No. 4 year 2009 on Mineral and Coal which has given mandate to the government to manage the source in order to give additional value for national economic.

"On this No.39 regulation, they are 24 mining products that were managed on their export trade system which are anthracite coal, bituminous, lignite, coke, coal gas, and other derivative product," Partogi Pangaribuan explained. 



PENERBITAN RESI GUDANG BULAN JULI 2014

		Penerbitan				
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. PERTANI					
	- Probolinggo (Banyuanyar)	Gabah	1	150	4.500	675.000.000
	- Probolinggo (Krasan)	Gabah	4	633	4.400	2.785.200.000
	- Lombok Barat	Gabah	2	616	5.500	3.388.880.000
	- Jombang (Mojoagung)	Gabah	1	190	5.500	1.045.000.000
	- Mojokerto	Gabah	1	100	5.500	550.165.000
Jumlah		Gabah	9	1689	5.080	8.444.245.000
Total			9	1689		8.444.245.000

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN JULI 2014

		Penerbitan			Pembiayaan		
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. PERTANI						
	- Probolinggo (Banyuanyar)	Gabah	1	675.000.000	1	472.000.000	Bank Jatim
	- Probolinggo (Krasan)	Gabah	4	2.785.200.000	4	1.855.000.000	Bank Jatim
	- Lombok Barat	Gabah	2	3.388.880.000			-
	- Jombang (Mojoagung)	Gabah	1	1.045.000.000	1	731.500.000	Bank Jatim
	- Mojokerto	Gabah	1	550.165.000			
Jumlah		Beras	9	8.444.245.000	6	2.327.000.000	
Total			9	8.444.245.000	6	2.327.000.000	

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN JULI 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode Juli 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi Juli 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-Juli 2014 (Rp.)
1.	Sumatera Barat	Nihil	1.297.640.000	11.829.507.500
2.	Jambi	Nihil	Nihil	5.639.241.000
3.	Lampung	Nihil	881.382.600	430.100.000
4.	Jawa Barat	787.600.000	18.129.500.000	45.899.555.000
5.	Jawa tengah	7.321.950.000	11.226.500.000	89.899.615.000
6.	Yogyakarta	Nihil	Nihil	68.192.600.000
7.	Jawa timur	525.000.000	7.728.400.000	102.280.150.000
8.	Bali	22.500.000	24.612.500.000	45.500.000
9.	NTB	Nihil	Nihil	23.663.600.000
10.	Sulawesi Utara	18.269.808.000	Nihil	64.668.375.000
11.	Sulawesi Selatan	1.560.400.000	1.100.000.000	16.208.850.000
12.	Sulawesi Tenggara	Nihil	Nihil	9.332.800.000
13.	Gorontalo	Nihil	Nihil	754.000.000
14.	PT iPASAR Indonesia	Nihil	273.858.000	130.000.000
15.	Pasar Fisik CPO	Nihil	7.540.000.000	Nihil
TOTAL		28.487.258.000	65.249.780.600	438.973.893.500

Sumber: Bappebti

PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE JULI 2014

Komoditas	Penawaran Mei 2014	Transaksi Januari - Mei 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	504.000 Kg	40.000 Kg	130.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	110.000 Kg	0	0
Gondorukem	1.632 Ton	0	0
TOTAL NILAI TRANSAKSI			130.000.000

Sumber: PT iPASAR, data diolah

Pokja SRG Percepat Implementasi

Pengantar Redaksi:

Kelompok Kerja- Pokja Sistem Resi Gudang (SRG) yang dibentuk pemerintah pusat diarahkan untuk mempercepat implementasi pemanfaatan gudang SRG yang telah dibangun sebanyak 117 unit di 102

kabupaten/kota.

Berikut ini bentuk dukungan yang diharapkan terlaksana dari masing-masing lembaga atau instansi yang terlibat di Pokja SRG;

PEMERINTAH PUSAT

Kemenko :

- Penyusunan Kebijakan Nasional untuk Mempercepat Pengembangan SRG
- Pengoordinasian Antar Sektor Pertanian, Keuangan, Perbankan dan Sektor Terkait Lainnya Untuk Pengembangan SRG
- Kerjasama antar Instansi dalam penyiapan SRG dari Pra-Panen hingga Pasca Panen
- Koordinasi Pengembangan Informasi Harga Komoditas;

Kementerian Perdagangan :

- Sinergi kebijakan persyaratan impor terkait dengan persyaratan pembelian komoditi dalam negeri (Dit. Impor);
- Pertukaran data informasi ketersediaan beras/gabah/jagung serta pemanfaatan gudang SRG dan sinergi informasi mengenai sebaran gudang (Dit. Bapokstra dan Dit. Logistik dan Sarana Distribusi);
- Pertukaran informasi terkait waktu dan jumlah impor beras dan jagung (Dit. Impor);
- Pelatihan bagi Pengelola Gudang untuk dapat melakukan Pengujian Mutu Komoditi (Dit. PPMB);
- Mendorong pemanfaatan SRG untuk pembiayaan dan penyimpanan komoditi Ekspor (Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan);

Kementerian Pertanian :

- Sinergi Peserta LDPM untuk ikut serta dalam Sistem Resi Gudang
- Pemanfaatan gudang Lumbung milik Gapoktan untuk menjadi gudang transit/pengumpulan sebelum dikirim ke gudang SRG
- Pelatihan bagi Tenaga Penyuluh Lapangan untuk ikut mensosialisasikan SRG;

Kementerian Kelautan dan Perikanan :

- Pemanfaatan gudang-gudang Rumput Laut yang telah dibangun dalam skema SRG;
- Mendorong pelaksanaan SRG untuk komoditi Garam;

Kementerian Keuangan :

- Optimalisasi pemanfaatan dan penyaluran Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG);

Kementerian Koperasi dan UKM :

- Optimalisasi penyaluran LPDB melalui SRG;
- Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi sebagai calon Pengelola Gudang SRG;

Kementerian Dalam Negeri:

- Mendorong Daerah memanfaatkan SRG sebagai salah satu solusi menekan inflasi dan meningkatkan perekonomian daerah.



PENGELOLA GUDANG

- Meningkatkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan menjadi *standby buyer* untuk komoditi yang disimpan di gudangnya;
- Ikut melakukan sosialisasi pemanfaatan SRG bagi petani maupun para pelaku usaha;
- Mendorong petani, kelompok tani, maupun para pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG sesuai UU No. 9 Tahun 2006;

PERBANKAN

- Meningkatkan komitmen dan kesiapan Perbankan dalam memberikan pembiayaan melalui skema SRG, baik untuk petani/kelompok tani/gapoktan maupun pedagang, pabrikan dan eksportir;
- Melakukan sosialisasi SRG bersama dengan Bappebti;
- Mempermudah dan menurunkan biaya-biaya terkait pembiayaan menggunakan Resi Gudang sesuai UU No. 9 Tahun 2006 tentang SRG;

BUMN

- Optimalisasi PKBL yang dimiliki dalam mendorong pelaksanaan SRG;
 - Menjadi *Standby Buyers* untuk komoditi SRG;
 - Pengembangan IS-WARE yang mengarah pada Sistem Informasi yang handal dan memiliki daya tarik masuknya stakeholders dalam SRG (PT KBI);
 - Dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional diharapkan BUMN yang bergerak di Pangan dapat melakukan pengelolaan pangan menggunakan SRG;
 - Berperan aktif sebagai Pengelola Gudang SRG;
- Melakukan sosialisasi SRG bersama dengan Bappebti dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait;



Fluktuasi harga komoditi bawang merah berkontribusi besar terhadap tingginya angka inflasi terutama menjelang atau perayaan hari besar keagamaan. Sebab itu perlu ada terobosan jitu yang tidak hanya memotong mata rantai perdagangan, melainkan juga peningkatan hasil produksi bawang merah secara nasional.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan limpahan sumber daya alam, baik pertanian maupun perikanan serta hasil laut. Salah satu komoditi yang menjadi bahan kebutuhan pokok sehari-hari adalah bawang merah. Bawang merah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, mulai dari konsumsi rumah tangga sampai dengan konsumsi skala besar seperti industri pabrik makanan. Luasnya konsumsi bawang merah di Indonesia merupakan indikasi pentingnya komoditas ini dalam mempengaruhi perekonomian nasional, salah satunya sebagai faktor pendorong inflasi.

Situs news.bisnis.com menjelaskan pada hari Kamis 1 Agustus 2013, bahwa kenaikan harga bawang merah juga menjadi salah satu *contributor* terbesar untuk inflasi secara nasional. Komoditas ini memberikan sumbangan inflasi hingga 0,48 % pada bulan Juli 2013. Di hari yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Mawardi Arsyad mengatakan bahwa kenaikan harga bawang merah menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua setelah kenaikan harga bahan bakar minyak- BBM. Di Pekanbaru, inflasi bulan Juli 2013 mencapai 1,96 %, dengan kontribusi dari bawang merah mencapai 0,46 %. Adapun di Dumai, inflasi mencapai 1,91%, dengan kontribusi kenaikan harga bawang merah sebesar 0,53 %.



Menilik Perdagangan Bawang Merah

*) Ary Miftakhul Huda

Di dalam pernyataan yang terbaru, pada tanggal 1 Juli 2014, Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin, mengatakan bahwa bawang merah memiliki andil sebesar 0,05 % sebagai penyebab utama inflasi. Hal ini terjadi karena penurunan hasil panen bawang merah. Penurunan panen bawang merah terjadi di 71 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dan kontribusi bawang merah dalam IHK tersebut mendorong terjadinya inflasi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi melalui *sector* agregat dinilai penting, salah satunya adalah perdagangan bawang merah.

Salah satu kota yang menjadi sentra perdagangan bawang merah di Indonesia adalah Kab. Brebes. Berdasarkan kompilasi data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, produksi bawang merah di Brebes mencapai 72,65 % dari luas lahan 24.910 Ha, sedangkan kontribusi 34 kabupaten/kota lain di Jateng total 25,35 % dari area seluas 12.700 Ha.

Dalam rangka pembukaan penyelenggaraan pasar lelang forward ko-

moditi agro pada tanggal 16 Juni 2014, lalu, di Kab. Brebes. oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, Kepala Bappebti menugaskan penulis dari Biro Analisis Pasar untuk menghadiri acara tersebut dan melakukan kajian komoditi bawang merah melalui wawancara dan observasi terhadap para pelaku yang terlibat dalam perdagangan bawang merah di Kab. Brebes

Jenis bawang merah yang dijual di Brebes, antara lain rogolan, lokal, askip, bekas sortiran, bibit/benih. Rogolan dibagi ke dalam dua jenis, yakni rogolan basah dan rogolan kering. Rogolan basah berarti bawang merah langsung dipotong setelah dicabut. Jenis ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan pasar terdekat seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Sedangkan rogolan kering berarti bawang merah yang dicabut harus dijemur selama maksimal 4 (empat) hari sebelum didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pasar Sumatera (Lampung, Sumat-



angan Brebes

era Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung & Jambi) dan Kalimantan (Banjarmasin dan Palangkaraya). Jenis *local* berarti setelah dicabut maksimal 3 (tiga) kali jemur kemudian digedeng. Askip berarti setelah dicabut akan dijemur selama minimal 7 (tujuh) hari kemudian digedeng. Jenis bekas sortiran berarti bawang merah hasil sortiran dari rogolan basah atau pun kering. Bibit atau benih berarti setelah dicabut bawang merah dijemur minimal 15 (limabelas) hari kemudian digedeng, lalu disimpan minimal 45 (empatpuluhlima) hari agar dapat ditawarkan sebagai benih.

Kendala

Realitas objektif perdagangan bawang merah di Kab. Brebes masih memiliki beberapa kendala. Karena rantai perdagangan bawang merah ini dinilai panjang sehingga tidak efektif dan efisien. Pihak yang terkait dalam rantai perdagangan bawang merah di Brebes, di antaranya petani, penebas, pedagang, calo, dan pemodal.

Petani yang menanam bawang merah di kebun tidak berminat untuk mengirimkan hasil panen bawang merah ke pasar karena lokasi dari sawah ke pasar yang berjauhan. Hal tersebut memberikan peluang bagi para penebas yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli hasil panen bawang merah petani di lapak.

Alhasil, lapak tidak hanya digunakan untuk mengeringkan bawang merah, tapi juga sebagai tempat untuk jual beli bawang merah. Kemudian, penebas menjual hasil panen tersebut kepada pedagang di pasar.

Para pedagang bawang merah ini memiliki konsumen tetap yakni pabrik industri makanan dan mie instan. Namun sayangnya para pedagang tersebut tidak dapat menjual langsung ke pengusaha makanan tersebut, melainkan melalui jasa calo. Calo inilah yang menghubungkan pedagang bawang merah ke pembeli tersebut. Para calo tersebut juga membutuhkan dana untuk transportasi dan logistik, oleh karena itu pemodal memberikan bantuan dana pinjaman kepada calo.

Masalah lain yang muncul dari perdagangan bawang merah di Brebes adalah tidak adanya pencatatan data perdagangan yang baik. Hal tersebut terjadi karena lemahnya kompetensi sumber daya manusia, sehingga data tidak tercatat secara *system* dan belum dapat diakses oleh Dinas atau Pemerintah.

Solusi

Implikasi sulitnya pendataan tersebut adalah kesulitan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat Brebes. Pada hal perputaran uang perdagangan bawang merah di Brebes sangat besar, mengingat pembeli bawang merah di Brebes merupakan pembeli yang berasal dari Jawa maupun luar Jawa.

Permasalahan dalam pendataan perdagangan bawang merah tersebut penting untuk segera ditindaklanjuti karena perdagangan bawang merah berpen-

garuh terhadap IHK yang merupakan salah satu faktor pendorong inflasi.

Solusi dari pemerintah daerah dalam menangani perdagangan bawang merah dan meningkatkan kualitas bawang merah dinilai masih belum optimal. Dinas Pertanian Kab. Brebes sudah melakukan pembinaan kelompok tani lewat Gerakan Kelompok Tani (Gapoktan), namun pembinaan ini kurang efektif karena tidak berkelanjutan. Akibatnya para petani Brebes menanam bawang merah dengan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki, sehingga tidak terlihat pengembangan peningkatan kualitas bawang merah yang ditanam.

Selain itu, koperasi yang ada di pasar Brebes tidak memiliki akses ke perbankan karena pihak perbankan masih kurang percaya terhadap para petani dan pedagang bawang merah. Hal ini menyebabkan para petani dan pedagang bawang merah kesulitan untuk menerima dana pinjaman, sehingga mereka meminjam dana dari pemodal.

Dalam rangka menjaga dan memajukan perdagangan bawang merah di Kab. Brebes, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang merangkul semua pihak yang terlibat dalam perdagangan bawang merah, mulai dari petani sampai pemodal. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam menjawab permasalahan perdagangan bawang merah di Kab. Brebes.

Untuk meningkatkan kualitas bawang merah, perlu ada pembinaan serta kajian untuk pengembangan bibit unggul untuk bawang merah sehingga dapat meningkatkan harga bawang merah.

Di samping itu, perlu adanya perluasan lahan khusus untuk pertanian, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas bawang merah dan memenuhi kebutuhan konsumsi bawang merah dari skala kecil sampai skala besar. Selain itu juga perlu ada subsidi pupuk dan pestisida untuk meringankan beban petani. (*) Staf, Biro Analisis Bappebti, Kemendag

Back to Basic

Sri Nastiti Budianti

6 tahun ditugaskan di luar negeri dan ditempatkan di sejumlah unit Kementerian Perdagangan, tidak membuat Nastiti, demikian dia dipanggil, lupa dengan perdagangan berjangka komoditi. Sebab, Nastiti termasuk salah satu saksi sejarah beroperasinya badan pelaksana perdagangan berjangka komoditi- Bapebti, yang kemudian menjadi lembaga pengawas dan pembina perdagangan berjangka yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti.

Menjadi pegawai negeri sipil-PNS sudah dilakoni Sri Nastiti Budianti, sejak Maret 1986, silam. Selama tiga bulan bergabung di Departemen Perdagangan saat itu, ia pun lolos dari seleksi sebagai pegawai Bapebti. "Untuk masuk ke Bapebti saat itu harus memiliki nilai plus tersendiri, jadi kalau yang mau masuk ke sana, harus tes lagi," buka Nastiti mengenang awal karirnya di Kementerian Perdagangan.

Akunya, sejak menapaki karir di Bapebti sudah merasakan berbagai posisi, mulai dari staf, kepala sub bagian dan menjadi kepala bagian. Rotasi posisi dalam lingkungan Bappebti pun sudah sering dilakoninya.

"Saya banyak belajar mengenai

Bappebti. Termasuk ketika proses kelahiran UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK yang sekarang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 2011, dan kelahiran bursa berjangka," katanya.

Masa berlalu, tahun 2006 Nastiti mendapat kepercayaan menjadi perwakilan Indonesia di luar negeri. Tepatnya menjadi Atase Perdagangan (Atdag) di Kanada selama empat tahun. Misinya sebagai Atdag mensupport ekspor Indonesia ke Kanada. "Alhamdulillah, tugas saya di sana berjalan dengan baik," ucapnya.

"Selepas Kanada, saya termasuk dari sekian Atdag yang mendapatkan promosi jabatan di Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, dan itu saya jalani selama setahun. Setelah itu, di mutasi lagi

menjadi Direktur Kerjasama Bilateral di Dirjen KPI. Di situ pekerjaannya melakukan lobi dan negosiasi hingga membuat *trade agreement* kepada sekitar 172 negara," kisahnya.

"Mendapat tugas sebagai peloby dan negosiator, saya cukup bangga. Karena posisi itu menempatkan saya sebagai corong untuk kebijakan Indonesia," ujarnya.

Namun, Nastiti dengan jujur bilang, *passion* dan kompetensi yang dimilikinya tidak sesuai dengan berbagai posisi itu. Wajar saja, dia terbentuk dan dibesarkan di Bapebti selama 20 tahun.

"Sebagai PNS, saya sadar betul dan bersedia ditempatkan di unit mana saja. Karena itu saya selalu berusaha untuk melakukan semua pekerjaan sebaik

mungkin. *I do my best in everything.* Tapi, posisi-posisi itu tetap saja ada gap-nya," kata ibu seorang putra ini.

Sekitar 6 tahun berlalu, Sri Nastiti Budianti, kembali berlabuh ke Bappebti. Bak perantau yang kembali ke kampung halaman, dia mengaku sangat senang. "Mungkin karena saya sudah kenal dengan lingkungannya, pekerjaannya, dan tupoksi Bappebti," ujarnya. "Jadi, tidak ada masalah meski harus menyesuaikan dengan isu-isu yang baru," sambungnya.

Pada 30 April 2014, dia dilantik Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat Gita Wirjawan, menjadi Kepala Biro Perniagaan Bappebti. Di posisi ini, dia melihat wajah industri PBK sudah terlihat berubah. Dari kacamataanya, sistem perdagangan alternatif (SPA) (transaksi bilateral) justru mengalahkan transaksi multilateral. "Pada hal dulu SPA itu kalah oleh multilateral, ini tentunya harus membuat kita introspeksi. Bursa berjangka seperti terbawa arus. Harusnya bursa konsen mengembangkan multilateral, tapi justru terlena kenikmatan SPA," ucap wanita berzodiak pieces ini.

Menurut Nastiti, SPA memang tidak mungkin dihapus dari UU. Tapi SPA hendaknya dapat berjalan dengan baik. Intinya, bagaimana SPA ini menjadi transparan, *fair*, dan tentu harus ada perlindungan untuk para nasabah.

Waktu berlalu, pada 14 Juli 2014, lalu, Sri Nastiti Budianti, kembali dilantik menjadi Sekretaris Bappebti. Tetapi kali ini yang melantiknya adalah Menteri Perdagangan, M. Lutfi. "Mungkin karena pimpinan menilai saya mampu mengemban tugas itu. Dan sekarang, saya berusaha untuk mengembannya dengan sebaik mungkin," katanya merendah.

Bisa jadi bagi Nastiti pencapaian itu adalah hal yang lumrah. Karena sejak menjadi PNS, dia memiliki ciita-cita selalu ingin berkembang. "Unlimited-lah, tidak ada batasnya untuk mencapai mimpi," katanya. Di pikirannya, dia bilang, setiap waktu harus selalu lebih baik. "Tapi ukurannya bukan jabatan 'lho," tegas wanita kelahiran Februari 1962 ini.

Dukungan Suami

Meski menjadi wanita karir, tapi dia tidak lupa akan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu. Wanita yang telah menikah pada tahun 1987 itu, mengaku mendapat dukungan positif dari suaminya saat menapaki karir panjangnya sebagai PNS. Tapi semua itu, tentunya melalui proses agar tercipta hubungan yang harmonis dalam rumah tangga.

"Kami belajar dari situasi, akhirnya kami sama-sama saling mengerti dan suami pun sepenuhnya *mensupport* karir saya," ungkapnya.

Kuncinya, harus bisa menempatkan posisi, di kantor atau di rumah. Sehingga suami mendapatkan kenyamanan dengan posisinya sebagai kepala keluarga.

"Di kantor jadi pejabat, di rumah jadi *Oshin*. Di kantor punya anak buah yang bisa disuruh-suruh, di rumah saya yang disuruh-suruh," kata dia sambari tertawa.

Satu hal yang selalu diingat Nastiti. Yaitu pesan suaminya agar dia menjaga kredibilitasnya sebagai PNS. "Jaga diri dari masalah yang dapat timbul di kemudian hari, misalnya masalah keuangan yang dapat membuat seseorang terjerat kasus korupsi," kata Nastiti menirukan pesan suaminya.

Di sisi lain, wanita yang hobi *traveling* ini, sering memanfaatkan hari liburnya dengan berjalan-jalan bersama keluarga. "Dulu saya anggota Pramuka, jadi suka kegiatan *out door*. Apalagi suami juga punya hobi fotografi, jadi lengkap 'deh kalau jalan-jalan, dapat *refreshing*-nya plus fotonya," kata Nastiti yang juga memiliki hobi menari ini.

Kerja Sosial

Kelak lepas pengabdianya menjadi PNS, Sri Nastiti Budianti memiliki obsesi menjadi pekerja sosial. Keinginan kuat itu sebenarnya sudah sejak lama dipendam. Tapi keinginan




itu kembali dikuatkan pada saat dia berziarah ke makam ibu mertua-nya di Medan, Sumut.

Saat itu, kisahnya, di salah satu dinding pembatas pemakaman itu tertera sebuah kalimat "manfaatkanlah usiamu selagi kamu bisa."

"Melihat tulisan itu, membuat saya sangat tersentuh. Saya coba memaknainya, manfaatkanlah usia selagi bisa, karena kita sebagai manusia lahir pasti punya tujuan, bukan semata-mata tujuan duniawi. Tapi akan ada kehidupan sesudah ini yang membutuhkan amal ibadah sebagai bekalnya," tutur Nastiti.

Tapi, kata dia, keinginan bekerja di bidang sosial tidak harus dilakukannya setelah dirinya tidak lagi menjadi PNS. Tidak juga harus mendirikan sebuah lembaga seperti yayasan.

"Untuk mendirikan sebuah yayasan perlu komitmen tinggi dan memperhatikan terus keberlangsungan hidup yayasan yang butuh waktu panjang. Jadi saya pikir, mulai dari hal yang kecil saja dapat kita lakukan sejak sekarang. Misalnya, membantu sesama yang tidak mampu di lingkungan terdekat kita," pungkas Nastiti. 

SISTEM RESI GUDANG



STABILITAS HARGA & PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - BAPPEBTI
www.bappebti.go.id